

## **BAB III**

### **TINJAUAN KAWASAN / WILAYAH**

#### **3.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

##### **3.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah**

###### **3.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 109<sup>o</sup> 47' 28" - 110<sup>o</sup> 8' 20" Bujur Timur dan 7<sup>o</sup> 32' - 7<sup>o</sup> 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari + 2/5 daerah dataran dan 3/5 daerah pegunungan dengan batasbatas wilayah adalah sebagai berikut: Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Magelang Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY Sebelah selatan : Samudra Indonesia Sebelah barat : Kabupaten Kebumen.



**Gambar 1.1 Peta Purworejo**

## Peraturan Daerah

- Koefisien Dasar Bangunan : 60%
- Koefisien Lantai Bangunan : 5
- Koefisien Dasar Hijau : 20%
- Garis Sempadan Bangunan : 10 meter dari as jalan
- Ketinggian Banguna Maksimal 5 lantai
- 

### 3.1.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

- Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo
- Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen.
- Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo,
- Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh. Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut.

Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

- Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

### **3.1.1.3 Kondisi Klimatologis**

Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Purworejo antara 19–28oC dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjumlahan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (trigger factor) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.

### **3.1.1.4 Kondisi Geologi**

Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional. Menurut studi PSBA UGM (2004) dalam RTRW Kabupaten Purworejo 2014-2025, satuan geomorfologi wilayah Kabupaten Purworejo dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi, meliputi : satuan perbukitan berelief tinggi, satuan morfologi berelief sedang, satuan morfologi lerengkaki gunungapi, dan

satuan morfologi dataran. Agihan satuan morfologi perbukitan berelief tinggi terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan bagian dari perbukitan Progo barat. Satuan morfologi berelief sedang terletak di bagian utara wilayah sebagai bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Satuan morfologi lerengkaki gunungapi berada pada lerengkaki gunungapi Sumbing yang posisinya pada bagian timur laut wilayah Kabupaten Purworejo. Pada daerah tengah hingga selatan terdapat satuan morfologi pedataran dan merupakan daerah dataran alluvial dan alluvial pantai. Secara umum Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 3 wilayah dengan jenis tanah yang berbeda, yaitu

:

- 1) Jenis tanah alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi. Disamping untuk budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman.
- 2) Jenis tanah Regosol mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi dengan agihan sebesar 5,03%. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan.
- 3) Jenis Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07%, dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik.

#### **3.1.1.5 Kondisi Hidrologi**

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensipotensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan

kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan. Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungaisungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

#### **3.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72,854.80 Ha atau 70,40 % dan tanah sawah seluas 30,626.97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10,116.50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51,598.14 Ha berupa tegal/kebun /ladang/huma, 6,857.88 Ha berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27,677.14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949.83 Ha. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman.

#### **3.1.1.7 Kondisi Pegunungan**

Secara umum wilayah Kabupaten Purworejo merupakan dataran rendah di bagian selatan dan sebagian barat serta daerah pegunungan di bagian utara dan timur yang termasuk dalam rangkaian pegunungan Menoreh Kedu Selatan. Kondisi ini mendukung dan mempercepat perkembangan Kabupaten Purworejo di bagian tengah ke selatan dan barat. Namun bagian utara dan timur masih sulit untuk dikembangkan.

### 3.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten purworejo ditetapkan menjadi kawasan strategis. Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Purworejo. Kawasan strategis ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk:

- 1) mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang ada, baik dari level Pusat hingga Daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan, ke kawasan – kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis, secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh
- 2) memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, kawasan strategis yang akan diangkat meliputi:
  - a. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo adalah kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo, Kawasan Bahari Terpadu, kawasan agropolitan serta kawasan kerjasama regional dan perbatasan.
  - b. Kawasan strategis untuk kepentingan sosio – kultural; Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan

sosio – kultural di Kabupaten Purworejo adalah Kawasan situs prasasti kayu arahiwang, Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kawasan alun-alun Purworejo dan sekitarnya, Kawasan alun-alun Kutoarjo dan sekitarnya, dan Kawasan Petilasan WR. Supratman di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing.

- c. Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo adalah Kawasan Daerah Aliran Sungai Bogowonto, Cokroyasan, dan Wawar, Kawasan pegunungan Menoreh di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, dan Bener, Kawasan pegunungan Serayu Selatan di Kecamatan Gebang, Bruno, Pituruh dan Kemiri, Kawasan mangrove di pantai Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi, Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Gunung Tumpeng di Desa Jetis, Kecamatan Loano, Kawasan dengan Daya Dukung Lingkungan Rendah, dan Kawasan Endemik Malaria.

### **3.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah rawan bencana Kabupaten purworejo ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Purworejo meliputi lahan kritis, erosi dan bencana tanah longsor di daerah bagian utara yaitu kecamatan Kaligesing, Loano, Bener, dan Bruno. Sedangkan daerah resiko banjir, angin puting beliung dan tsunami di bagian selatan yaitu di kecamatan Purwodadi, Butuh dan Grabag. Upaya penanganan banjir pada wilayah selatan ini dilakukan secara terpadu dengan mengkoordinasikan kerjasama lintas wilayah administratif dan lintas sektoral. Disamping itu seluruh wilayah Kabupaten Purworejo juga berpotensi terhadap gempa

bumi. Upaya-upaya penanganan tersebut meliputi kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis yang terletak di sekitar jalur lintas air serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Kebijaksanaan pengamanan kawasan lindung ditentukan sesuai dengan tujuan pemantapannya, yaitu mencegah terjadinya bencana (lahan kritis, longsor dan banjir), meningkatkan fungsi hidroorologis, dan menjaga kelestarian kawasan bawahan maupun disekitarnya sendiri. Pengendalian dan pengarahan kegiatan yang ada dan berkembang di kawasan tersebut untuk menjaga fungsi kawasan, serta pemantapan kawasan lindung. Pengurangan atau relokasi penduduk pada kawasan rawan bencana, Pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung.

#### **3.1.4 Demografi**

Manusia (penduduk) merupakan salah satu modal dalam pembangunan. Daya guna dari modal tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi yang meliputi kuantitas, kualitas dan distribusinya. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 sebesar 782.662 jiwa, terdiri dari 384.953 jiwa penduduk laki-laki dan 397.953 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yaitu sebesar 774.285 jiwa yang terdiri dari 381.217 jiwa penduduk laki-laki dan 392.068 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,19%, tingkat pertumbuhan ini termasuk kategori rendah. Jumlah penduduk tahun 2015 diprediksi sebanyak 791.627 jiwa. Selama kurun waktu 2014 – 2019, sex ratio atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu berkisar 96 : 100, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Sedangkan angka kepadatan penduduk selama tahun 2014-2019 rata-rata sebesar 752 jiwa/km<sup>2</sup>, termasuk tingkat kepadatan cukup, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah lebih rendah. Kepadatan penduduk Jawa Tengah sebesar 994,97 jiwa per km persegi. Dilihat dari persebarannya, jumlah penduduk tahun 2014 terbanyak berada di Kecamatan Purworejo sebesar 90.519 jiwa dan yang terendah berada di Kecamatan Kaligesing sebesar 35.969 jiwa.

## 3.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 3.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 3.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dominasi sektor-sektor pembentuk PDRB tersebut. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Setiap tahun data PDRB dikumpulkan dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dua versi yaitu harga konstan dan harga berlaku. PDRB Kabupaten Purworejo atas harga berlaku dalam kurun waktu tahun 2014-2019 meningkat tiap tahun rata-rata sebesar 17,45%, yaitu dari Rp 3.443.170,90 pada tahun 2014 menjadi Rp 5.849.537,33 juta rupiah pada tahun 2018. Sedangkan PDRB Kabupaten Purworejo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2014 sebesar Rp 2.321.543,36 juta, menjadi sebesar Rp. 2.872.723,79 juta, atau bertambah sebesar Rp. 551.080,43 juta pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 5,38% per tahun.

Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 serta Perkembangannya di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2019

Tabel 3.1 Distribusi dan laju pertumbuhan tiap sektor PDRB atas harga kurun waktu 2014-2019

Lapangan Usaha	Distri busi	Pertum Buhan								
Pertanian	36.40	4,12	35.93	3,86	35.21	3,96	34.96	4,87	34.43	3,39
Pertambangan dan Penggalian	2,26	2,98	2,25	4,73	2,17	2,24	2,13	3,44	2,00	-1,03
Industri Pengolahan	9,51	8,88	9,56	5,78	10,16	12,74	10,05	4,40	9,96	4,01
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	4,77	0,51	3,30	0,51	5,65	0,51	4,49	0,52	6,55
Bangunan	5,42	2,11	5,53	7,42	5,47	4,78	5,44	5,10	5,51	6,26
Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,84	6,29	16,76	4,75	16,82	6,46	16,74	5,11	16,83	5,54
Pengangkutan dan Komunikasi	5,80	9,16	5,98	8,56	5,97	5,85	6,04	6,93	6,13	6,53
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,21	9,64	5,39	8,95	5,62	10,47	5,75	8,20	5,88	7,24
Jasa-Jasa	18,03	1,51	18,07	5,48	18,07	6,08	18,38	7,43	18,74	6,95

Kontribusi sektor pertanian pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018, sebesar 32,81% dengan laju pertumbuhan 7,78%. Kontribusi PDRB terkecil berasal dari lapangan usaha sektor listrik, gas, air. Tahun 2018 menyumbang sebesar 0,79% untuk PDRB. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, kontribusi sektor pertanian sebesar 34,43% dengan laju pertumbuhan 3,39%. Kontribusi PDRB terkecil juga berasal dari lapangan usaha sektor listrik, gas, air. Tahun 2018 menyumbang sebesar 0,52% untuk PDRB. Prediksi lima tahun ke depan (2015) PDRB Kabupaten Purworejo baik atas dasar harga konstan maupun berlaku, masih didominasi oleh sektor pertanian, walupun kontribusinya menurun. Kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) diprediksikan masih berkisar antara 30% – 35%. Sementara itu sektor lain diprediksikan meningkat kontribusinya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri. Perkembangan sektor industri lebih diarahkan pada peningkatan industri pengolahan hasil pertanian dan pendukungnya yang banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan dari kecenderungan perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Purworejo, jika dilihat dari kelompok sektor (sektor primer, sekunder, dan tersier) maka dominasi kelompok sektor primer telah bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan tertier. Walaupun demikian karakternya masih dipengaruhi perekonomian primer (agriculture/pertanian). Kondisi ini sejalan dengan komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Purworejo yaitu dengan masih dominannya untuk kegiatan pertanian (primer). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara umum dapat diketahui dari pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2014-2019 bersifat fluktuatif dan ada kecenderungan negatif, yaitu berturut-turut sebesar 4,85; 5,23; 6,08; 5,62; dan 4,96. Hal ini dipengaruhi situasi politik nasional dan daerah yang masih belum kondusif. Walaupun jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah (4.71%), maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo masih lebih tinggi dari pertumbuhan di tingkat propinsi. Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6.32%, Kabupaten Purworejo masih lebih rendah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo lima tahun ke depan (2015) diprediksikan masih fluktuatif, mengikuti pasang surutnya perekonomian nasional, regional, maupun global.

### 3.2.1.2 Laju Inflasi

Angka inflasi Kabupaten Purworejo dari tahun 2014 sampai tahun 2018 memiliki kecenderungan cukup baik yaitu turun hingga di bawah 5 %. Angka inflasi dalam kurun waktu tersebut yaitu berturut-turut sebesar 5,84; 16,39; 7,75; 10,70; dan 3,98. Kecenderungan yang sama juga terjadi pula di tingkat propinsi Jawa Tengah dan nasional. Menurunnya angka inflasi tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan turunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dan ditandai stabilnya harga pada kelompok barang dan jasa. Namun, kondisi ini kurang sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo yang terus menurun sampai level 4,95% di tahun 2018. Hal ini disebabkan terjadi penurunan pertumbuhan di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Purworejo. Sektor pertanian secara prosentase terhadap APBD hanya menempati kurang lebih 33% dari total nilai PDRB, tetapi memiliki dampak yang sangat kuat terhadap sektor lainnya, sehingga sangat berpengaruh terhadap keseluruhan kapasitas ekonomi Kabupaten Purworejo.

### 3.2.1.3 PDRB per kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Purworejo atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar Rp 4.812.345,86, tahun 2018 sudah menjadi Rp 8.068.627,84 atau naik sebesar 14,26% tiap tahun. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Purworejo atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar Rp 3.224.703,76, tahun 2018 sudah menjadi Rp 3.962.525,21 atau naik sebesar 4,92% tiap tahun.

Tabel 2.4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019

Tabel 3.2 PRDB per kapita

Tahun	PDRB per Kapita (harga berlaku)		PDRB per Kapita (harga konstan tahun 2000)	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2005	4.812.345,86	15,94	3.224.703,76	4,21
2006	5.707.718,23	18,61	3.405.602,61	4,96
2007	6.478.747,52	13,51	3.602.376,69	5,78
2008	7.376.755,82	13,86	3.789.441,58	5,19
2009	8.068.627,84	9,38	3.962.525,21	4,57

Sumber: Bapeda dan BPS Kabupaten Purworejo, 2014

### 3.2.1.4 Pemerataan

Pendapatan diukur dengan Indeks Gini dan versi Bank Dunia, dan Koefisien indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Hal ini berarti semakin besar indeks gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial. Berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo indeks gini Kabupaten Purworejo tahun 2014-2007 menunjukkan kecenderungan lebih baik yaitu berturut-turut; 0,2825; 0,2699; dan 0,2288. Indeks gini tersebut masuk dalam kategori ketimpangan rendah ( $G < 0,3$ ). Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia diperhitungkan dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, dan 40% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung prosentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia Kabupaten Purworejo tahun 2018 dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah dengan 40% penduduk berpenghasilan terendah menikmati > 17% (yaitu 25,94%) dari total pendapatan.

### **3.2.1.5 Ketimpangan wilayah dengan Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)**

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten. Nilai indeks yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten yang semakin tinggi. Dan apabila mendekati angka 0 menunjukkan ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten yang semakin rendah. Indeks Williamson Kabupaten Purworejo dari tahun 2014-2019 menunjukkan angka yang semakin membaik yaitu mengarah ke angka nol yaitu berturut-turut 0,7044; 0,7122; 0,7145; 0,6800; dan 0,6066. Walaupun demikian angka tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup besar (kesenjangan wilayah yang cukup tinggi). Prediksi lima tahun ke depan indeks Williamson berkisar antara 0,5000 dan 0,4000.

### **3.2.1.6 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan**

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dapat dilihat dari prosentase penduduk miskin. Prosentase penduduk miskin Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 berturut-turut adalah; 22,77%; 22,75%; 20,49%; 15,5%; 17,2%. Berdasarkan data prosentase penduduk miskin tersebut (dengan mengasumsikan data penduduk miskin sebagai penduduk di bawah garis kemiskinan) maka prosentase penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2006-2018 berturut-turut adalah; 77,23%, 77,25%; 79,51%; dan 84,5%; 82,8%. 2.2.1.7 Angka kriminalitas yang tertangani Jumlah kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2001-2014 adalah 15, 11, 12, 0, dan 41 kasus. Kasus-kasus yang terjadi diantaranya pembunuhan, aniaya berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, pencurian biasa, narkoba, penipuan perjudian, pencurian kayu, perkosaan dan lainlain. Kasus unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Purworejo. Tercatat 2014 kasus unjuk rasa terjadi karena alasan politik dan ekonomi.

### 3.2.1.7 Pendidikan

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari urusan pendidikan, meliputi; angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, secara rinci sebagai berikut:

- 1) Angka melek huruf Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2018 berturut-turut sebesar 86,90%; 88,37%; 88,87%; 88,90%; dan 89,20%.
- 2) Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 7,20; 7,30; 7,30; 7,30; dan 7 tahun.
- 3) Angka partisipasi kasar (APK) PAUD Kabupaten Purworejo tahun 2018 sebesar 48,65 %. APK SD/MI/Paket A Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 110,06 %; 106,00%; 104,01%; 102,49%; dan 103,90%. APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2018 berturut-turut sebesar 111,18 %; 112,57%; 105,08%; 99,68%; dan 94,20%. APK SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 65,98 %; 63,47%; 61,31%; 61,11%; dan 61,68%.
- 4) Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) Kabupaten Purworejo tahun 2018 untuk tingkat belum sekolah/tidak tamat SD 32,25 %, SD sebesar 28,87%, SMP sebesar 16,63%, SMA sebesar 17,99% dan universitas sebesar 4,24 %.
- 5) Angka partisipasi murni (APM) PAUD Kabupaten Purworejo tahun 2018 sebesar 48,65 %. APM SD/MI/Paket A Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 94,53 %; 92,90%; 89,54%; 86,98%; dan 88,79%. APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 80,14%; 79,84%; 78,87%; 73,74%; dan 71,52%. APM SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2018 berturut-turut sebesar 44,54 %; 45,24%; 44,96%; 44,94%; dan 45,23%.

### 3.2.1.8 Kesehatan

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari urusan kesehatan, meliputi; Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup, dan prosentase balita gizi buruk atau prevalensi gizi buruk, secara rinci sebagai berikut:

- 1) Angka kelangsungan hidup bayi Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 989,20; 989,83; 991,10; 991,40; dan 987,33 per 1000 kelahiran hidup.
- 2) Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 68,9; 69,50; 69,71; 70,01; dan 70,01 tahun.
- 3) Prosentase balita gizi buruk atau disebut juga prevalensi gizi buruk Kabupaten Purworejo tahun 2018 sebesar 4,73%, termasuk kategori prevalensi gizi buruk rendah.
- 4) Angka Kematian Ibu (AKI)/1000 KH, penduduk Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 102,88; 131; 217,321; 164,48; dan 109,17 per 1000 kelahiran hidup.
- 5) Angka Kematian Bayi (AKB)/100.000 KH, penduduk Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 10,80; 10,18; 8,9; 8,5; dan 10,50 per 100.000 kelahiran hidup.
- 6) Kasus HIV AID's penduduk Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 0; 0; 2; 8; dan 3 kasus. 7) Prosentase penduduk Kabupaten Purworejo yang terserang penyakit malaria selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 0,45; 0,45; ,55; 0,54; dan 0,45 kasus

### **3.2.1.9 Pertanahan**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari urusan pertanahan, yaitu prosentase penduduk yang memiliki lahan. Prosentase penduduk yang memiliki lahan Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 25,26%; 25,13%; 25,80%; 25,63%; dan 26,94%.

### **3.2.1.10 Ketenagakerjaan**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat dari urusan ketenagakerjaan, yaitu Rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Purworejo tahun 2018 adalah 98,21%. Jumlah pengangguran penduduk di Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2019 berturut-turut sebesar 9.771; 16.002; 7.815; 11.978.

## **3.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **3.2.2.1 Kebudayaan**

Fokus kesejahteraan sosial dilihat dari urusan kebudayaan, meliputi; jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2008 berturut-turut sebanyak 291, 297, 304, dan 304 grup. Sedangkan Selama ini Kabupaten Purworejo belum mempunyai gedung kesenian. Jika ada pentas kesenian di selenggarakan di pendopo Bupati.

### **3.2.2.2 Kepemudaan dan olahraga**

Fokus kesejahteraan sosial dilihat dari urusan kepemudaan dan olahraga, meliputi;

Jumlah klub olahraga dan Jumlah gedung olah raga. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Purworejo selama tahun 2014-2008 berturut-turut sebanyak 41, 46,45, dan 45 buah. Sedangkan jumlah gedung olah raga dari tahun 2014 sampai dengan 2018 masih 1 buah yaitu GOR WR. Supratman.

## **3.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **3.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib**

#### **3.3.1.1 Urusan Pendidikan**

Gambaran kinerja pelayanan urusan pendidikan Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- Data PAUD di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 – 2018 terdapat pertumbuhan jumlah PAUD pada tahun 2018 bila di bandingkan tahun 2014 sebesar 27,68%, hal ini relevan dengan meningkatnya perhatian orang tua dalam menyiapkan pendidikan anaknya sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI yang mendorong banyak berdiri lembaga PAUD formal maupun non formal.

Data capaian dan pretasi Pendidikan serta Kualifikasi Guru S1/DIV, Sertifikasi Guru Sekolah Prinsip MBS dan Sekolah standar Nasional di Kabupaten Purworejo 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- Terdapat kenaikan APK tahun 2018 bila dibandingkan tahun 2014 pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 5,14%, dalam kurun waktu yang sama terjadi penurunan APK pada jenjang pendidikan dasar ( SD / SMP ), Penurunan ini karena jumlah penduduk usia pendidikan dasar (SD/SMP) berkecenderungan menurun.
- Terdapat kenaikan APM Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2014 pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 6,78%, dalam kurun waktu yang sama terjadi penurunan APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 7,05% dan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 3,00%. Kenaikan APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA karena adanya anak dari luar daerah seperti Jogjakarta, Magelang, Wonosobo dan Kebumen yang bersekolah di SMA/SMK/MA di wilayah Purworejo. Sementara terjadi selisih penurunan APM pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs karena pada tahun 2014 banyak anak usia 12 tahun (jenjang pendidikan SD/MI) sudah masuk pada jenjang pendidikan SMP/MTS, demikian juga banyaknya anak usia 15 tahun (jenjang pendidikan SMP/MTs) yang masuk ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
- Terdapat penurunan APS pada tahun 2018 dibanding tahun 2014 sebesar 0,04% pada jenjang pendidikan SD/MI, 0,16% SMP/MTs dan 0,17% SMA/SMK/MA. Terdapat kenaikan AL pada tahun 2018 dibanding tahun 2014 pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 1,90%, dalam kurun waktu yang sama terjadi penurunan 0,12% pada jenjang pendidikan SD/MI dan 4,26% SMP/MTs dikarenakan pemberlakuan UASBN pada jenjang Sekolah Dasar dan penambahan mata pelajaran yang diujikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- Terdapat kenaikan AM pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014 dari SD/MI ke SMP/MTs 2,67% dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 0,06%.
- Terdapat penurunan Angka Buta Huruf pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2014 sebanyak 8.781 orang. Pada sisi yang lain terdapat kenaikan prosentase

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf pada tahun 2018 di bandingkan tahun 2014 sebesar 8,78%. Kondisi yang demikian karena keberhasilan penanganan program pemberantasan buta huruf yang komprehensif.

- Terdapat peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 bila dibandingkan tahun 2014 yakni 734 orang (meningkat 21,4%) untuk Guru SD/MI, 971 orang (meningkat 44,95%) untuk Guru SMP/MTs, 892 orang (meningkat 51,98%) untuk Guru SMA/SMK/MA dan Guru SLB 22 orang (meningkat 38,18%).
  - Guru yang lolos sertifikasi pada tahun 2018 untuk guru SD/MI sebanyak 537 orang (15,37%), SMP/MTs 327 orang (15,41%), SMA/SMK/MA 113 orang (6,46%) dan Guru SLB sebanyak 8 orang (15,38%).
  - Terdapat peningkatan Sekolah yang menerapkan MBS pada tahun 2018 bila dibandingkan tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 7,23%, sedangkan SMP/MTs dan SMA/MA telah 100% menerapkan MBS
  - Sekolah Standar Nasional pada tahun 2018 untuk sekolah SD/MI sebanyak 14 sekolah (2,41%), SMP/MTs sebanyak 19 sekolah (16,52%) dan SMA sebanyak 25 sekolah 92,59%).
  - Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sampai akhir tahun 2018 telah terbentuk untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama 2 sekolah (1,74%), jenjang Sekolah Menengah untuk jenis SMA 2 sekolah (7,41%) dan SMK 1 sekolah (2,78%).
- Kondisi dan kualitas Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Purworejo pada kurun waktu tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:
- Pembangunan ruang kelas baru pada 2014 – 2018 untuk ruang kelas SMP/ MTs sejumlah 43 ruang kelas, dalam kurun waktu yang sama tidak dilakukan pembangunan ruang kelas baru untuk SD/MI dan SMA/SMK/MA.
  - Terdapat 43,18% ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik, 8,07% rusak sedang, dan 48,74% rusak berat pada tahun 2014. Kondisi tersebut berubah pada tahun 2018 khususnya ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik meningkat menjadi 81,26%; 12,65% rusak sedang dan 6,67% rusak berat.
  - Terdapat 89,73% ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik, 7,59% rusak sedang dan 2,66% rusak berat pada tahun 2014, kondisinya berubah pada tahun 2018 ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik meningkat menjadi 92,02%,

sedang jumlah ruang kelas rusak sedang dan rusak berat terjadi penurunan masing-masing 5,74% dan 2,26%.

- Terdapat 95% ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik, 3% rusak sedang, dan 2% rusak berat pada tahun 2014, kondisinya berubah pada tahun 2018, untuk ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik meningkat menjadi 95,10%, ruang kelas rusak sedang dan rusak berat menurun masing-masing 2,93% dan 1,95%. 4) Ketersediaan Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Praktek SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tahun 2014 – 2018 adalah dalam upaya meningkatkan pelayanan bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purworejo telah mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen, yang antara lain :
  - PADATI : Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Data Individual Sekolah dari Kemendiknas (Pusat Statistik Pendidikan) sampai Dinas Pendidikan Kabupaten
  - DAPODIK: Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan dengan Jaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS) dengan produk NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)
  - NUPTK: Sistem Informasi untuk Pendataan Tenaga Pendidik (Nomor Unique Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - BIOSIYSTEM: Sistem Informasi Pendataan Peserta Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2015 jumlah penduduk usia sekolah mulai dari usia sekolah PAUD (3 – 6 tahun) 44.234 jiwa, sedangkan untuk usia SD (7 – 12 tahun) sebesar 79.457 jiwa, dan penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) sebanyak 46.219 jiwa dan penduduk usia SMA (16 – 18 tahun) sebanyak 45.692 jiwa.

Pada tahun 2011 - 2015 diprediksi bahwa APK PAUD akan mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 60,61%. Pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 2010 APK PAUD diprediksikan 37,45% Asumsinya adalah tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menyekolahkan anak sedini mungkin. Selain itu jumlah lembaga PAUD sudah semakin banyak dan baik. Sedangkan APM SD Diperkirakan akan mengalami peningkatan dan pada tahun

2015 akan mencapai 99,85%. APK SMP diprediksikan akan fluktuatif dengan angka berkisar 98-105%. Tahun 2015 APK SMP diperkirakan mencapai 100,42%. Sedangkan APK SMA terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 APK SMA mencapai 72,69%. Perkembangan pendidikan PAUD layak pada tahun 2015 menjadi sebesar 70%. Rasio pendidik dengan murid PAUD tahun 2015 dipertahan 1:20 diupayakan dengan melalui penambahan jumlah guru dan prasarana PAUD serta penambahan lembaga baru. Rasio siswa SLTA dan SMK tahun 2015 pada tahun 2015 38:64. Untuk angka naik kelas jenjang pendidikan dasar dan SLTP, pada tahun tahun emncapai 2015 sebesar 99,1%. Angka putus sekolah SD dan SLTP tahun 2015 sebesar 0,35%. Sedangkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK pada tahun 2015 diprediksikan sebesar 0,44%. Angka lulus SD pada tahun 2015 diprediksikan sebesar 99,63%. Sedangkan Angka lulus SLTP pada tahun 2015 sebesar 87,5%. Untuk pendidikan non formal Angka Lulus Kesetaraan Paket A pada tahun 2015 sebesar 80%. Untuk paket B Angka Lulus tahun 2015 sebesar 83%. Untuk paket C tahun 2015 sebesar 90%. Nilai rata-rata UASBN tahun 2015 sebesar 7,1. Nilai ratarata UN SLTP tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 7,1. Sedangkan untuk tingkat SLTA nilai rata-rata tahun 2015 diprediksikan sebesar 7. DiKabupaten Purworejo ruang kelas SD yang telah memenuhi standar pada tahun 2015 diprediksikan sebesar 78%. Sedangkan ruang kelas SMP dan SMA yang telah memenuhi standar diprediksikan sebesar 94%.

### **3.3.1.2 Urusan Kesehatan**

Gambaran kinerja pelayanan urusan kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat selisih meningkat kunjungan ibu hamil pada tahun 2018 ada kenaikan sebesar 5,1% (K1) dan 2,1% (K4) bila dibandingkan dengan Tahun 2014. K1 adalah Kontak pertama ibu hamil dengan Tenaga Kesehatan. K4 adalah Kontak ke 4 (terakhir) Ibu hamil dengan Tenaga Kesehatan sebelum terjadi persalinan
- 2) Terdapat selisih meningkat cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2018 sebesar 32,6% bila dibandingkan tahun 2014. Kondisi tersebut

- dipengaruhi adanya kunjungan Ibu Hamil dari luar daerah seperti Wonosobo, Magelang, Kebumen sehingga jumlah ibu hamil yang ditangani menjadi tinggi.
- 3) Terdapat selisih meningkat cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2018 sebesar 11,7% bila dibandingkan tahun 2014, hal ini disebabkan penambahan tenaga kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan di PKD maupun Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
  - 4) Terdapat penurunan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) pada tahun 2018 sebesar 0,4% bila dibandingkan tahun 2014 dikarenakan target Nasional terlalu tinggi (107/100.000 penduduk) dengan target penemuan 70%. Sementara kondisi dilapangan penderita penyakit TBC BTA (+) di Kabupaten Purworejo jauh di bawah angka perkiraan Nasional, dimana tahun 2014 sebanyak 274 dan tahun 2018 sebanyak 273 penderita TBC (BTA+).
  - 5) Terdapat kenaikan Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2018 sebesar 1,4% bila dibandingkan tahun 2014. Dalam rentang waktu 2014 – 2018 Cakupan Desa UCI berfluktuatif, khususnya tahun 2008 dan 2018 terjadi penurunan Desa UCI karena ada perubahan kriteria penetapan Desa UCI yang semula (s/d 2007) hanya berdasarkan cakupan imunisasi Campak, sedangkan tahun 2008 s/d sekarang berdasarkan cakupan imunisasi BCG, DPT HB 3, Polio 4 dan Campak.
  - 6) Terdapat selisih meningkat prosentase cakupan Kunjungan Bayi pada tahun 2008 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,5% dan terjadi penurunan di tahun 2018 yang disebabkan adanya perubahan kriteria cakupan kunjungan bayi yang semula hanya dengan kunjungan kedua menjadi kunjungan ketiga.
  - 7) Terdapat selisih meningkat prosentase cakupan imunisasi dasar bayi tahun 2018 dibandingkan tahun 2014 sebesar 5%, bahkan cakupan tahun 2008 & 2018 lebih dari 100% hal ini disebabkan adanya kunjungan bayi dari luar wilayah Kabupaten Purworejo.
  - 8) Tahun 2014 sebagai data dasar, AKB turun 0,62% (2006), turun 1,28% (2007), turun 0,40% (2008) dan naik 2% (2018). Bila membandingkan capaian tahun 2018 terhadap data dasar (2014) terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

0,30% kondisi AKB 2008 ke 2018 meningkat disebabkan terjadi peningkatan jumlah kehamilan beresiko tinggi.

- 9) Tahun 2014 sebagai data dasar, terjadi selisih meningkat Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 sebesar 6,2/100000 Kh bila di bandingkan tahun 2014. pada tahun 2006, dan 2007 terjadi fluktuasi peningkatan AKI yang relative tinggi, Kondisi yang demikian karenakan banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi (Hipertensy, Jarak persalinan terlalu dekat, usia terlalu muda/terlalu tua) terlambat mengambil keputusan untuk merujuk sehingga penanganannya terlambat berakibat kematian Ibu melahirkan. Memasuki tahun 2008 dan 2018 berkecenderungan menurun 52,84% dan 55,31%. Kecenderungan tersebut juga terpotret pada Kematian Ibu Bersalin di RSUD berfluktuatif, terjadi penurunan pada 2006, meningkat di 2007 dan 2008 dan menurun kembali pada 2018.
- 10) Terjadi selisih meningkat jumlah balita gizi kurang pada tahun 2018 sebesar 684 balita gizi kurang bila di bandingkan tahun 2014, perkembangan kondisi tersebut dipengaruhi dengan adanya bayi lahir dengan BB rendah (kurang dari 2,5 Kg) dan faktor kemampuan ekonomi keluarga (kemiskinan).
- 11) Terdapat peningkatan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2018 sebesar 2,85% dibandingkan tahun 2014 dikarenakan semakin dirasakan manfaat JPS/JPKMM/Jamkesmas untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat.
- 12) Pada tahun 2014 dan 2006 semua pasien miskin terlayani dengan dana Jamkesmas/JPKM Gakin. Sedangkan pada tahun 2007 – 2018 terdapat peningkatan jumlah pasien miskin yang mendapat pelayanan kesehatan non quota Depkes disebabkan pengetahuan masyarakat tentang ketersediaan dana pendamping untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin oleh Depkes semakin meningkat. Tingkat kesadaran Maskin untuk mencari pengobatan semakin meningkat.
- 13) Data penduduk miskin yang memiliki JAMKESMAS di Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 berturut-turut adalah 170.424; 188.527; 238.603; 238.603; dan 238.603 orang. Sedangkan Pasien Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan non quota Depkes di Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 berturut-turut adalah 0; 0; 303; 1.228; dan 2.446 orang.

- 14) Terdapat peningkatan kunjungan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas dari tahun 2014 s.d. tahun 2018 dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- 15) Terdapat peningkatan pemeriksaan Calon Jemaah Haji dari tahun 2014-2019. jumlah Calon Jemaah Haji yang dilayani sesuai dengan quota haji Kabupaten.
- 16) Tabel 2.5 menunjukkan ketersediaan dokter, bidan, dan perawat tahun 2014-2019.

**Tabel Ketersediaan Fasilitas kesehatan**

Tabel 2.5 Ketersediaan dokter, bidan, dan perawat Tahun 2014 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Dokter Umum	51	59	64	76	72
2	Dokter Spesialis :					
	a) Penyakit Dalam	2	2	3	3	3
	b) THT	1	1	1	2	2
	c) Saraf	1	1	1	1	1
	d) Anak	3	4	4	4	4
	e) OG	3	4	6	7	7
	f) Kulit dan kelamin	1	1	1	1	2
	g) Radiologi	1	1	1	1	1
	h) Kesehatan Jiwa	1	2	2	2	2
	i) Bedah	2	5	5	4	4
	j) Anestesi	1	2	2	2	2
	k) Mata	2	2	2	3	3
	l) Orthopedi & Traumatik	-	1	1	1	1
3	Dokter Gigi	18	21	39	42	41
4	Bidan	223	234	239	241	252
5	Perawat	127	127	142	150	154
6	Paramedis lain	47	85	84	95	101

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

### 3.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Gambaran kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1) Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (Aspal Kondisi baik ) tahun 2014 – 2018 secara berturut turut 27,84% (2014); 33,47% (2006); 38,01% (2007); 49,29% (2008); 55,44% (2018). Secara rinci data Jalan tahun 2014 – 2018 Kabupaten Purworejo tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Urusan pekerjaan umum

Tabel 2.7 Panjang jalan 2014 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		3	4	5	6	7
1	Jumlah/Panjang (Km)					
a)	Jalan Nasional	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80
b)	Jalan Provinsi	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09
c)	Jalan Kabupaten	764,29	764,29	764,29	764,29	764,29
2	Klas Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan perkotaan (Km)					
a)	Klas I	-	-	-	-	-
b)	Klas II	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80
c)	Klas III A	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09
d)	Klas III B	554,58	554,58	554,58	554,58	554,58

Berdasarkan data dasar tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah jembatan (beton dan rangka baja) pada tahun 2018 sebesar 44,34%. prosentase jembatan (beton dan rangka baja) dalam kondisi baik 2014 – 2018 secara berurut turut 66,98% (2014), 66,67% (2006), 63,30% (2007), 62,16% (2008), dan 72,55% (2018). Secara rinci data jembatan tahun 2014 – 2018 Kabupaten Purworejo tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Kondisi Jembatan Tahun 2014 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		3	4	5	6	7
1	Jenis jembatan (Buah)					
a)	Beton	65	66	67	69	90
b)	Besi / Rangka Baja	41	42	42	42	63
c)	Gorong - gorong	323	323	323	232	232
2	Panjang Jembatan (M)					
a)	Beton	1.609	1.616	1.676	1.763	1.777
b)	Besi / Rangka Baja	1.330	1.330	1.330	1.330	1.392
c)	Gorong - Gorong	323	323	323	232	232
3	Kondisi Jembatan Baik (Buah)					
a)	Beton	41	42	42	42	63
b)	Besi / Rangka Baja	30	30	27	27	48
c)	Gorong-gorong	300	310	310	232	232
4	Kondisi Jembatan Rusak (Buah)					
a)	Beton (rusak sedang)	24	24	25	27	27
b)	Besi / Rangka Baja	11	12	15	15	15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

### 3.3.1.4 Urusan Penataan Ruang

Gambaran kinerja pelayanan urusan penataan ruang Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) kabupaten Purworejo melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).
- 2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Aglomerasi Kota Purworejo dan Kutoarjo;
- 3) Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) Geparang, Kecamatan Purwodadi;
- 4) Penyusunan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bagelen.
- 5) Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- 6) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Purworejo
- 7) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kinerja Urusan Penataan Ruang diprediksikan hingga tahun 2015 akan meningkat khususnya dalam menghadapi kemajuan di banyak sektor, sampai dengan tahun 2015 akan banyak permasalahan tentang penataan ruang di daerah. Namun demikian pada tahun 2015 diprediksikan bahwa penegakan perda tata ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang kabupaten semakin baik. Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memungkinkan bagi kabupaten untuk melakukan penataan dan mengawasi pelaksanaan Perda tentang tata ruang dengan lebih baik. Beberapa kawasan yang telah ditetapkan Kabupaten Purworejo dapat terus disinergikan dengan pola pembangunan kewilayahan di daerah seperti pembangunan kawasan aglomerasi (pertumbuhan) Purworejo-Kutoarjo, Kawasan Bahari Terpadu (KBT) untuk pengembangan Kawasan Pesisir, Kawasan Agropolitan, Kawasan Geger Menjangan dan lain sebagainya sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Purworejo yang baru.

### 3.3.1.5 Urusan Perencanaan Pembangunan

Gambaran kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2025.
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2010. Sekarang masih dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2011-2015.
- Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada yaitu Peraturan Bupati Purworejo No.17 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011.
- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD masih dalam proses penyusunan RPJMD. Perencanaan pembangunan daerah dimasa mendatang akan menjadi semakin kompleks dan rumit, karena banyak faktor yang saling mempengaruhi kebijakan. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo harus memperhitungkan kebijakan nasional dan komitmen Pemerintah Pusat terkait dengan kesepakatan internasional dan ratifikasi konvensi internasional, misalnya; Capaian Pendidikan Untuk Semua (EFA), Laporan CEDAW, Capaian Pembangunan Millenium yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015, Laporan Pelaksanaan Hak Ekonomi dan Sosial (Ekosob). Demikian pula dengan amanat beberapa peraturan perundangan yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), seperti; RAD Pengurangan Resiko Bencana (amanat UU No. 24 tahun 2008); RAD Pemberdayaan Perempuan (Permendagri No. 15 tahun 2008), RTRW dan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai, serta memperhatikan SPM. Pada tahun 2015, diprediksikan Kabupaten Purworejo sudah mulai dirintis menjadi kawasan agropolitan yang ditandai dengan adanya tambahan Sub Terminal Agribisnis Krendetan berkembang menjadi terminal Agropolitan Kawasan Agropolian Bagelen disamping Sub terminal Kalianyar pada Kawasan Agropolitan Kuto Bumi Pitu Grabag. Pengembangan kawasan Agropolitan direncanakan lebih lanjut menjadi pusat kegiatan pertanian dari berbagai wilayah termasuk dari wilayah Provinsi DIY.

Penyusunan perencanaan pembangunan dimasa mendatang memerlukan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam segenap tahap perencanaan. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan daerah dimasa mendatang.

### **3.3.1.6 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Gambaran kinerja pelayanan urusan koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pertumbuhan jumlah Koperasi dan UMKM pada tahun 2018 sebesar 29,29% bila di bandingkan tahun 2014.
- 2) Jumlah koperasi berfluktuasi, perkembangan prosentase koperasi katagori sehat kurun waktu 2014 – 2018 secara berturut turut 30,77% (2014), 40,80% (2006), 40,58% (2007), 39,32% (2008) dan 40% (2018)
- 3) Terjadi penurunan jumlah anggota koperasi pada tahun 2018 sebanyak 43.429 anggota (21,71%) bila di bandingkan tahun 2014, kondisi penurunan tersebut dipengaruhi perubahan jumlah anggota dari anggota PNS (guru) yang memasuki usia pensiun dan juga banyak anggota KUD atau anggota koperasi yang lain keluar dan bergabung menjadi nasabah KUR yang digulirkan BRI.

### **3.3.1.7 Urusan Penanaman Modal**

Gambaran kinerja pelayanan urusan penanaman modal Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Purworejo tahun 2018 berjumlah 1 investor untuk PMA dan 323 investor untuk PMDN.
- 2) 2) Berdasarkan aktivitas Penanaman modal dan investasi, dapat diketahui besaran Investasi yang masuk di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2014 – 2018 berturut-turut sebesar Rp. 29.956.853.000; Rp. 136.176.254.343 ; Rp. 136.691.310.651; Rp. 51.809.913.369 dan Rp. 42.155.264.415.
- 3) Perijinan investasi yang diterbitkan Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2014 – 2018 berturut-turut sejumlah 307, 594, 407, 425, dan 324 ijin.

Dalam upaya mendukung pelayanan publik, sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi, Pemerintah kabupaten Purworejo menggunakan konsep "One Stop Service" (OSS) untuk pelayanan perizinan. Konsep ini mensyaratkan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap pengajuan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen perizinan dilaksanakan di satu tempat. Disamping itu KPPT juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi manajemen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan aplikasi Sistem Informasi manajemen diperoleh beberapa manfaat, antara lain : Kemudahan dalam mencari data, Validasi data, karena semua data diproses secara elektronik oleh computer, Menghindari kesalahan dalam perhitungan retribusi dan Data cukup di entri sekali , kemudian divisi lain cukup melakukan revisi bilamana perlu, dan membuat pelaporan dengan memanggil semua data yang diperlukan. Perkembangan penanaman modal sampai dengan tahun 2015, akan dipengaruhi oleh jenis-jenis potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan. Dalam hal pelayanan perijinan penanaman modal pada masa yang akan datang akan semakin ringkas dan mudah. Peningkatan pelayanan perijinan usaha sangat mendukung pertumbuhan penanaman modal. Namun demikian, tingkat persaingan antar kabupaten/kota dalam menarik investor juga semakin ketat. Dengan demikian, jika pengertian penanaman modal hanya dibatasi pada jenis penanaman modal besar, pada masa yang akan datang perkembangannya akan relatif rendah. Fluktuasi nilai penanaman modal akan terjadi pada saat telah ada investor yang merealisasikan investasinya untuk mengelola potensi investasi yang saat ini ditawarkan, yakni agrobisnis, perikanan tangkap dan budidaya dan pengelolaan bahan tambang. Namun kedepan, pemerintah Kabupaten Purworejo perlu lebih memperhatikan investasi UMKM. Oleh karena itu, kemudahan perijinan dan iklim investasi yang semakin kondusif bagi penanaman modal yang dilakukan oleh pengusaha lokal dalam skala yang kecil perlu semakin diperhatikan. Oleh karena itu, fasilitasi dan revitaliasi pasar tradisional yang ada di setiap kecamatan sebanyak 25 unit dan dua unit pasar hewan perlu semakin ditingkatkan di masa mendatang